



Salam Redaksi

Integritas sering dibicarakan, tetapi jarang diuji secara objektif. Di tengah skeptisisme publik terhadap partai politik, capaian PKS sebagai peraih skor tertinggi dalam Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 menjadi momentum refleksi—bukan untuk berpuas diri, melainkan untuk menegaskan bahwa politik masih bisa dijalankan dengan sistem, nilai, dan disiplin kelembagaan yang terukur. Pengakuan dari institusi negara melalui parameter yang metodologis dan akuntabel memberi pesan bahwa integritas bukan mitos; ia bisa dibangun, dijaga, dan dinilai secara rasional.

Edisi ke-11 ini mengulas secara argumentatif dan sistemik mengapa integritas menjadi jalan perjuangan, bukan sekadar atribut moral. Dari penegakan kode etik, demokrasi internal, kaderisasi berkelanjutan, hingga transparansi keuangan—semuanya menunjukkan bahwa integritas bukan soal figur, melainkan arsitektur organisasi. Tantangan ke depan bukan mempertahankan peringkat, tetapi menjaga ruhnya: memastikan bahwa nilai tetap menjadi kompas, kekuasaan tetap terkendali, dan demokrasi tetap beradab.

Selamat Membaca...



MPP PKS

eBuletin IDEOLOGI

Diterbitkan oleh Majelis
Pertimbangan Pusat
(MPP)
Partai Keadilan Sejahtera

Media sosialisasi
Konsepsi Dasar Partai
(KDP) baik AD/ART,
Falsafah, Platform, GBKP,
Renstra PKS, dll.

Menjabarkan secara
jelas dan padat KDP
untuk pengokohan
IDEOLOGI Partai.

Karenanya penting
dibaca dan dihayati bagi
pimpinan dan kader PKS.
Juga untuk edukasi
masyarakat luas agar
lebih mengenal
perjuangan PKS.



Integritas sebagai Jalan Perjuangan (Mengapa PKS Unggul dalam Indeks Integritas Partai Politik 2025)

Dr. Hermanto, MM
Ketua Komisi, MPP PKS

Pendahuluan

Integritas bukan hanya sekedar retorika dan slogan politik, namun itu adalah sebagai jati diri dengan pondasi moral dan etika yang wujud pada setiap anggota partai demi keberlanjutan demokrasi yang etis.

Tanpa integritas, demokrasi akan berubah menjadi prosedur administratif elektoral yang kehilangan ruh. Tanpa integritas, kekuasaan akan kehilangan makna hingga berubah menjadi alat kepentingan sempit.

Karena itu, ketika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai sebagai partai dengan skor tertinggi dalam Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 oleh

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional. Menurut hemat kami, Penilaian yang dilakukan oleh kedua Instansi Pemerintahan tersebut tentu berdasarkan parameter yang bersifat objektif, faktual, metodologis, transparan dan akuntabel.

Oleh karena itu, capaian nilai integritas tertinggi bagi PKS dari kedua Instansi Pemerintahan tersebut bukanlah peristiwa administratif biasa. Hal itu, mencerminkan perilaku, sistem, budaya, dan manhaj kelembagaan yang telah lama dibangun, tumbuh dan berkembang dengan penerapan prinsip good party governance.

Keunggulan integritas tidak lahir dalam satu malam.

Hal itu, merupakan hasil kerja secara metodologis, sistimik, terukur dan evaluatif serta konsisten dalam waktu panjang melalui tata kelola partai yang berbasis nilai, disiplin organisasi, dan kepemimpinan kolektif.

Integritas yang dimaksud bukan hanya integritas personal, melainkan integritas substantif kolektif yang melembaga—integritas yang hidup dalam perilaku, sistem, aturan, dan budaya organisasi.

Dengan kerendahan hati, kami mengucapkan terimakasih pada kedua Instansi Pemerintahan tersebut yang telah memberikan nilai integritas tertinggi untuk PKS.

Hal itu, menjadi cemeti bagi PKS untuk terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan demi terwujudnya demokrasi yang etis, santun dan beradab sebagai jalan perjuangan yang harus ditempuh.

Kode Etik sebagai Penjaga Moral Organisasi

Salah satu faktor utama yang membuat PKS unggul adalah keberadaan kode etik yang tidak hanya tertulis, tetapi juga ditegakkan. Kode etik dalam PKS tidak berdiri sendiri sebagai dokumen formal, melainkan menjadi bagian dari kultur pembinaan kader.



Keberadaan Dewan Syariah dan struktur pengawasan internal memperkuat sistem ini. Mekanisme sanksi terhadap pelanggaran tidak bersifat simbolik, melainkan memiliki konsekuensi nyata. Hal ini menunjukkan bahwa integritas bukan sekadar retorika, tetapi komitmen yang diuji dalam praktik.

Partai yang memiliki kode etik namun tidak menegakkannya akan kehilangan kredibilitas. Sebaliknya, partai yang menegakkan etikanya secara konsisten menunjukkan kedewasaan kelembagaan.

Inilah yang menjadi salah satu kekuatan utama PKS

Integritas Berbasis Ideologi dan Proses Ideologisasi

Selain faktor struktural, integritas PKS dimungkinkan oleh kokohnya basis ideologi partai. Ideologi bukan sekadar identitas, tetapi sumber nilai, arah perjuangan dan pengikat loyalitas.



Integritas bukan hanya sekedar retorika dan slogan politik, namun itu adalah sebagai jati diri dengan pondasi moral dan etika yang wujud pada setiap anggota partai demi keberlanjutan demokrasi yang etis.

Integritas lahir dari kesadaran nilai yang kuat, bukan sekedar pengawasan formal.

PKS secara sistematis melakukan proses ideologisasi yang berkelanjutan kepada kader, pengurus partai, dan pejabat publiknya. Proses ini dilakukan melalui pembinaan, pendidikan politik, diskusi strategis, serta internalisasi nilai dalam kehidupan organisasi dan pelayanan publik. Ideologisasi tidak berhenti pada tingkat pemahaman, tetapi diarahkan pada penghayatan dan pengamalan.

Dengan ideologi yang kokoh, kader memiliki orientasi yang jelas tentang tujuan perjuangan. Hal ini mengurangi pragmatisme politik dan memperkuat konsistensi antara nilai dan tindakan. Integritas dalam perspektif ini bukan sekedar kepatuhan terhadap aturan, tetapi kesadaran spiritual dan moral.

Ideologi juga berfungsi sebagai jangkar loyalitas. Dalam kondisi tekanan politik maupun godaan kekuasaan, ideologi menjaga kader tetap berada pada koridor perjuangan. Partai yang memiliki basis ideologis kuat cenderung lebih stabil, lebih disiplin, dan lebih tahan terhadap fragmentasi internal.

Karena itu, ideologisasi yang terus-menerus menjadi salah satu faktor kunci yang menjelaskan mengapa integritas PKS dapat terjaga secara sistemik.

Demokrasi Internal dan Kolektivitas Kepemimpinan

Indikator penting lainnya dalam IIPP adalah demokrasi internal. PKS dikenal memiliki struktur musyawarah yang berjenjang dan mekanisme pengambilan keputusan yang kolektif. Keputusan strategis tidak sepenuhnya ditentukan oleh satu figur, melainkan melalui forum struktural seperti Majelis Syura.

Pembatasan masa jabatan pimpinan maksimal dua periode menjadi bukti nyata komitmen terhadap sirkulasi kepemimpinan. Dalam banyak partai politik, konsentrasi kekuasaan jangka panjang menjadi sumber masalah integritas. PKS berupaya meminimalisasi risiko tersebut melalui mekanisme kelembagaan yang membatasi personalisasi kekuasaan..

Sirkulasi kepemimpinan bukan sekadar prosedur administratif. Ia adalah mekanisme regenerasi yang memastikan organisasi tetap dinamis, adaptif, dan tidak stagnan. Dalam perspektif good party governance, pembatasan masa jabatan adalah indikator penting kesehatan institusi.

Kaderisasi sebagai Fondasi Integritas

Salah satu pembeda PKS dibanding banyak partai lain adalah sistem kaderisasi yang berkelanjutan. Kaderisasi bukan hanya proses administratif untuk mencetak anggota, melainkan pembinaan ideologis, etis, dan kepemimpinan.

Kader yang dipersiapkan secara sistemik cenderung memiliki konsistensi nilai dan loyalitas terhadap manhaj partai. Hal ini meminimalisasi risiko rekrutmen oportunistik yang hanya berbasis popularitas atau kekuatan finansial.

Integritas tidak bisa dipaksakan dari luar. Ia harus dibangun dari dalam melalui pembinaan berjenjang. Sistem tarbiyah dan penguatan ideologis menjadi salah satu faktor penting yang menopang budaya integritas di PKS.

Rekrutmen Politik yang Berbasis Seleksi

Rekrutmen politik yang selektif menjadi indikator penting dalam penilaian integritas. PKS relatif tidak sepenuhnya mengandalkan figur instan, melainkan melalui proses seleksi internal yang berlapis.

Rekam jejak, kapasitas, dan komitmen terhadap nilai menjadi pertimbangan dalam penetapan calon legislatif maupun pejabat publik. Proses ini meningkatkan konsistensi antara nilai partai dan perilaku kader di ruang publik.

Dalam sistem politik yang sering kali pragmatis, konsistensi rekrutmen menjadi indikator penting integritas kelembagaan.

Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan

Pengelolaan keuangan partai merupakan salah satu aspek paling sensitif dalam tata kelola politik. IIPP memberikan bobot penting pada transparansi dan akuntabilitas keuangan.

PKS dinilai memiliki sistem pelaporan yang relatif tertib dan mekanisme pertanggungjawaban internal yang jelas. Akuntabilitas keuangan bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari etika publik.

Partai yang mampu menjaga transparansi finansial menunjukkan komitmen terhadap kepercayaan publik. Dalam demokrasi modern, kepercayaan adalah modal politik yang paling berharga.

Budaya Amal Jama'i dan Kohesi Ideologis

Selain faktor struktural, terdapat faktor kultural yang tidak kalah penting: budaya kerja kolektif (amal jama'i) dan kohesi ideologis. Partai dengan identitas ideologis yang relatif solid cenderung memiliki disiplin organisasi yang lebih kuat.

Kohesi ini menciptakan stabilitas internal dan meminimalisasi konflik destruktif. Integritas kelembagaan tidak hanya ditentukan oleh aturan, tetapi juga oleh budaya organisasi yang menumbuhkan loyalitas terhadap keputusan kolektif.

Integritas sebagai Amanah Kebangsaan

Keunggulan PKS dalam IIPP 2025 bukanlah tujuan akhir. Ia adalah amanah dan tantangan untuk menjaga konsistensi. Integritas yang diraih harus terus dipelihara dan ditingkatkan.

Lebih dari sekadar pencapaian administratif, capaian ini memiliki makna kebangsaan. Partai politik adalah pilar demokrasi. Jika partai berintegritas, maka demokrasi memiliki fondasi yang kuat. Jika partai rapuh secara integritas, maka demokrasi pun rentan.



Dalam konteks Indonesia Madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat, integritas partai menjadi bagian dari perjuangan menghadirkan politik yang bersih dan bertanggung jawab.

Integritas adalah jembatan antara nilai dan kebijakan, antara ideologi dan praktik pemerintahan.

Penutup

Keunggulan PKS dalam Indeks Integritas Partai Politik 2025 lahir dari kombinasi sistem kelembagaan yang rapi, penegakan kode etik, demokrasi internal, kaderisasi berkelanjutan, rekrutmen selektif, transparansi keuangan, serta ideologisasi yang terus-menerus.

Integritas yang terlembaga inilah yang menjadi fondasi kekuatan PKS. Bukan sekadar integritas personal, tetapi integritas sistemik.

Ke depan, tantangan terbesar bukanlah mempertahankan peringkat, melainkan menjaga ruh integritas itu sendiri. Karena pada akhirnya, politik yang berintegritas bukan hanya tentang reputasi partai, tetapi tentang masa depan demokrasi dan kemaslahatan bangsa.#



KABAR MPP



MPP PKS DAN MPR RI GELAR FORUM STRATEGIS: INDONESIA DI TENGAH BADAI GEOPOLITIK GLOBAL, SIAPKAH? OUTLOOK POLITIK 2026

Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bekerja sama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) sukses menyelenggarakan Forum Diskusi Aktual Berbangsa dan Bernegara bertajuk "Posisi Indonesia di Tengah Pergeseran Lingkungan Strategis Global dan Outlook Politik Nasional 2026".

Acara berlangsung di Hotel Aloft South Jakarta pada Selasa, 17 Februari 2026, dan dihadiri para pakar, akademisi, politisi, serta pemangku kepentingan kebangsaan. Forum ini menjadi ruang diskusi mendalam di tengah dinamika dunia yang semakin tidak menentu: rivalitas superpower, krisis energi, perang dagang, hingga disrupsi digital yang mengubah segalanya.

Dr. Mulyanto, Ketua MPP PKS, dalam sambutannya menegaskan: "Kolaborasi MPP PKS dengan MPR RI ini diharapkan melahirkan gagasan-gagasan segar dan actionable untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung global. Kita tidak boleh hanya jadi penonton – Indonesia harus punya suara yang kuat dan kebijakan luar negeri yang visioner demi kemajuan bangsa."

Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI, menekankan fondasi konstitusi yang tak tergoyahkan: "Pembukaan UUD 1945, khususnya Pasal Keempat yang mewajibkan Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) – semuanya tidak boleh diubah. Ini adalah garis merah kebangsaan kita di tengah gejolak global."

Dr. Almuzammil Yusuf, Presiden PKS sekaligus Anggota DPR RI, membawa perspektif kekinian: "Transformasi digital bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Siapa yang tidak bertransformasi digital akan kehilangan relevansi di era revolusi media, ekonomi, dan politik saat ini. Bagi PKS, digitalisasi adalah wujud dakwah dalam arti luas: energi positif, aksi nyata, dan rahmat bagi semesta – Islam rahmatan lil 'alamin di semua ranah kehidupan."

Para narasumber lain yang turut memperkaya diskusi meliputi: Dr. Rizal Darma Putra (Dosen Universitas Bakri & Pendiri Lesperassi), Prof. Yon Mahmudi (Akademisi Universitas Indonesia) dan Dr. Ismail Fahmi (Founder Drone Emprit – pakar analisis media sosial)